

Kekuatan hukum alat bukti petunjuk didasarkan pada persesuaian keterangan saksi dengan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah dalam hal minimnya alat bukti kasus tindak pidana perkosaan (studi kasus putusan mahkamah agung no 979 k pid sus 2011) = Legal strength of judicial evidence based on correspondence between statements of witnesses and visum et repertum as legal evidence in rape case that lack of evidence criminal case no 979 k pid sus 2011 / Debby Naztty Pratiwi

Debby Naztty Pratiwi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20402256&lokasi=lokal>

---

Abstrak

This thesis is discussing about how the judicial evidence that based on correspondence between statements of witnesses and visum et repertum has legal strength in verification process of Indonesian Criminal Justice System, how judicial evidence influences the judge in giving verdict for the defendant and how the court judge addressing the lack of evidence in rape case and what is the impact of on the judge's decision through Supreme Court decision No. 979 K/PID.SUS/2011. This reseach formed in juridicial normative reseach that using secondary data such as national regulation and related literature, also using primary data such as result of interview with related informants, both academics and practitioners, which the data were processed by qualitative method.

**ABSTRAK**  
Skripsi ini membahas bagaimana kekuatan hukum alat bukti petunjuk yang dihasilkan dari persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti surat dalam pembuktian di persidangan pidana Indonesia, pengaruh alat bukti petunjuk bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa serta bagaimana hakim agung menyikapi alat bukti yang minim dan pengaruhnya terhadap putusan melalui studi putusan Mahkamah Agung No. 979 K/PID.SUS/2011. Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk yuridis normatif yang menggunakan data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait serta data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari kalangan akademisi maupun praktisi yang diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan hukum yang bebas sehingga peran aktif hakim dalam menggali persesuaian antara alat bukti lainnya sangat besar. Persesuaian tersebut terjadi apabila korelasi antara alat bukti mengaruh pada suatu kondisi tertentu bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana. (2) Hakim Agung menjalankan kewenangannya sebagai judex juris sehingga dalam menyikapi alat bukti yang minim, hakim melihat pada penerapan hukum pembuktian di tingkat judex factie (3) Majelis Hakim yang menangani perkara dalam putusan No. 979 K/PID.SUS/2011 telah menggunakan alat bukti petunjuk sebagai salah satu dasar memutus pidana terdakwa, tetapi proses diperolehnya alat bukti petunjuk kurang tepat.

**ABSTRACT**  
The result of this research explained that (1) Judicial Evidence has free legal strength so that the judge should actively take a role in finding correspondence between other legal evidences. That correspondence occurs when there is correlation between legal evidences which leads into a certain condition telling the truth that the defendant the only one who commit a crime. (2) The court judges execute their authority as judex juris so that in addressing the lack of evidence they will take a look at the use of law of evidence in judex factie. (3) The court judges who handle the criminal case in Supreme

Court's decision No. 979 K/PID.SUS/2011 has used judicial evidence as one basic requirement in making verdict to the defendant, but the process in obtaining that judicial evidence is not suitable with the national regulation.